



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	32 (tiga puluh dua)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Hari, Tanggal	:	Selasa, 20 September 2022
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	M. Sarmuji, S.E., M.M. /Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai progres PT. Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Bank BUMN.
Hadir	:	1. Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Sekretaris Kementerian BUMN RI, Bapak Susyanto 3. Direktur Utama PT Bank Syariah Tbk Bapak Hery Gunardi. Beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk pada pukul 13.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 20 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E., M.M.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., mengenai profil perusahaan, kinerja keuangan, rencana usaha perusahaan dan strategi perusahaan dalam upaya untuk menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk terus mengawal dan memastikan proses status PT Bank Syariah Indonesia Tbk., menjadi Bank BUMN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk., untuk memperkuat kultur perusahaan setelah melakukan merger 3 Bank Syariah (Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah) agar kesetupaduan perusahaan dapat segera terwujud dan tidak mengganggu aktivitas bisnis perusahaan.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk., untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah melalui program pemberdayaan UMKM, ultra mikro dan wirausaha sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
5. Komisi VI DPR RI mendukung PT Bank Syariah Indonesia Tbk., meningkatkan upaya perusahaan dalam mendukung *Economic Islamic Ecosystem* di Indonesia.
6. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk., untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih efektif dan efisien.
7. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk., untuk mempercepat aksi korporasi dalam rangka peningkatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar dapat meningkatkan fungsi intermediasi dan mampu bersaing dengan bank lainnya.
8. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk., untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.02 WIB.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN
BUMN RI**

Ttd.

SUSYANTO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M. SARMUJI, S.E., M.M.
A-318**

**DIREKTUR UTAMA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

Ttd.

HERY GUNARDI